



**RILIS**  
**KUNJUNGAN KERJA (KUNKER) SPESIFIK BIDANG PENDIDIKAN**  
**KOMISI X DPR RI KE KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2024—2025**  
**TANGGAL 20—22 NOVEMBER 2024**

=====  
Komisi X DPR RI melaksanakan Kunker Spesifik Bidang Pendidikan ke Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024—2025 tanggal 20—22 November 2024. Kunjungan dipimpin oleh H. Lalu Hadrian Irfani, S.T., dan diikuti oleh beberapa Anggota Komisi X DPR RI. Kunker Spesifik ini dilaksanakan untuk menyerap aspirasi dari Pemerintah Kota Surabaya dan para pemangku kepentingan pendidikan di Kota Surabaya Jawa Timur, melihat secara langsung pelaksanaan Kurikulum Merdeka, Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dan wacana tentang pengadaan kembali Ujian Nasional.

Kunjungan diterima oleh Penjabat Sementara Walikota Surabaya Restu Novi Widiani yang dihadiri oleh Pimpinan/Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Kepala Dinas Pendidikan, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan, Komite Sekolah, Dewan Pendidikan Daerah, dan para pelaku pendidikan lain di Kota Surabaya. Kunjungan kerja ini juga dilakukan dengan peninjauan lapangan ke SMP Negeri 19 Surabaya.

Pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Kota Surabaya secara umum tergolong baik termasuk terhadap pelaksanaan PPDB. Terdapat 4 (empat) jalur PPDB di Kota Surabaya, yaitu jalur afirmasi (15%), Perpindahan tugas orang tua (5%), jalur prestasi (30%), dan jalur zonasi (50%-70%). Prosentase tiap jalur PPDB dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi, serta memperhatikan daya tampung sekolah, sehingga tercipta PPDB yang lebih adil terhadap masyarakat maupun anak didik. Kurikulum Merdeka, diimplementasikan dengan program “Sekolahe Arek Suroboyo” yang keberhasilannya diindikasikan melalui lingkungan sekolah yang aman, menyenangkan (*joy-full*), mendidik (*educative*), dan kegotong-royongan. Mutu program ini tercermin dari mutu intrakurikuler, mutu ko-kurikuler, mutu ekstra-kurikuler, mutu budaya dan lingkungan, serta mutu manajemen berbasis sekolah. SMPN 19 Surabaya yang menjadi tempat kunjungan misalnya, telah menunjukkan banyak keberhasilan melalui prestasi akademik maupun non-akademik.

Salah satu hal yang menjadi usulan oleh pemangku kepentingan pendidikan di Kota Surabaya pada diskusi dengan Komisi X DPR RI, antara lain adalah perlunya sinkronisasi data siswa dari keluarga miskin agar mereka tetap bisa sekolah, peningkatan beasiswa PIP, perlunya menghilangkan favoritisme sekolah, kesetaraan sekolah negeri dan sekolah swasta, strategi penguatan literasi siswa, peningkatan kualitas sekolah inklusif, status tanah Perumnas di SMAN 11 Surabaya yang menyebabkan kendala perbaikan sarana prasarana, dan beberapa aspirasi lain.

Secara umum Komisi X DPR RI mengapresiasi keberhasilan pendidikan di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, dan meminta pemangku kepentingan pendidikan di Kota Surabaya untuk menyampaikan catatan terkait harapan terhadap pemerintahan baru di bidang pendidikan.

Surabaya, 22 November 2024

Tim Kunker Spesifik Komisi X DPR RI ke Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur